

BAB II

KONDISI SOSIAL POLITIK SURABAYA

Kondisi sosial politik masyarakat Surabaya pada tahun 1960-1965, tidak berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia lainnya, khususnya karena pengaruh dari kondisi pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Pada awal tahun 60-an, kondisi sosial politik Surabaya memang belum sepenuhnya dalam keadaan baik bahkan pada periode inilah banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia berikutnya. Pengaruh tersebut timbul karena persaingan antara PKI dan pendukungnya melawan Angkatan Darat dan pihak-pihak yang menentang PKI, dalam memperebutkan kekuasaan yang ada di Indonesia. Di Surabaya sendiri pertentangan tersebut juga sangat terasa, segala sesuatu yang terjadi di pusat dengan mudah dan cepat dirasakan ke daerah-daerah. Hal ini disebabkan media massa pada masa itu sudah berkembang dengan baik sebagai sarana penyebar informasi dan pendidikan masyarakat¹.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, pimpinan pemerintahan kembali dipegang oleh Presiden. Dekrit 5 Juli 1959 menjadi akhir dari liberalisme dan sistem parlementer di Indonesia. Kebijakan Pemerintah mengenai politik dalam negeri telah

¹Media massa sebagai alat penyebar informasi kepada masyarakat baik itu berupa radio maupun surat kabar dan majalah sudah berkembang di daerah-daerah dan masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah.

menimbulkan konflik-konflik yang meresakan masyarakat, misalnya presiden menempuh siasat untuk menciptakan dominasi tiga aliran kekuatan politik yaitu Nasionalisme, Agama dan Komunis (Nasakom) dalam lembaga-lembaga negara maupun organisasi-organisasi masyarakat. Dengan demikian, MPRS, DPR, DPA dan Front Nasional secara politis psikologis berada dalam kendali ketiga aliran tersebut. PKI menggunakan dalih nasakomisasi untuk menuntut kursi dalam pemerintahan dan juga nasakomunisasi dalam Angkatan Bersenjata, selain itu sebagai bagian dari "ofensif revolusioner" yang dilancarkan, PKI bersama organisasi-organisasi pendukungnya menentang kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah dan menyerang orang-orang yang menghalangi rencana mereka, menggerakkan aksi-aksi sepihak di pedesaan, menyudutkan golongan anti komunis, dan menuntut pembentukan Angkatan ke lima.

Golongan ekstrim kiri PKI memperoleh kemenangan politis psikologis dari sejumlah tindakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang mereka serang. Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (*Manipol*) dan ditetapkan sebagai Garis Besar Haluan Negara, kehidupan politik nasional berkembang diatas rel Demokrasi Terpimpin. Pers Nasional waktu itu menjadi terpinpin dan pers Manipol². Landasan Hukum Manipolisasi Pers Nasional

² Pengurus Pusat PWI, *Sejarah dan Hari Depan Pers Nasional* (Jakarta: SPS Pusat, tth) hlm. 45. Pers terpinpin dan pers Manipol adalah suatu persyaratan bagi surat kabar untuk dapat terus terbit di Indonesia sesuai dengan Peperti No.10/1960, yang isinya diantaranya: pers wajib mendukung dan membela Manipol dan program Pemerintah, pers menjadi alat penyebarluasan Manipol dengan tujuan menghapus Imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme dan separatisme.

tersebut adalah Lampiran A, Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Ketetapan tersebut menggariskan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi massa revolusioner di seluruh Indonesia. Rakyat harus didorong untuk memiliki keyakinan yang teguh tentang sosialisme Indonesia, sehingga dukungan bagi kelangsungan revolusi dan peranannya dalam pembangunan nasional dapat terwujud. Menurut ketetapan tersebut dijelaskan bahwa semua media komunikasi massa seperti pers, radio, film, dan sebagainya harus digerakkan sebagai satu kesatuan terpadu secara terpinpin, berencana dan terus-menerus kearah kesadaran mengenai sosialisme Indonesia dan Pancasila. Usaha Pemerintah dalam memanipolkan pers tersebut menuju pers sosialis yaitu dengan membantu dalam pengadaan fasilitas, latihan, pendidikan, penerangan dan pembangunan pabrik-pabrik kertas³.

Berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah memberi angin kepada orang-orang PKI untuk melancarkan gerakan propaganda mereka maupun aksi-aksi lainnya. Para buruh di Surabaya, banyak yang sudah menjadi anggota PKI dengan bergabung ke dalam organisasi SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk mendukung aksi PKI guna mewujudkan tujuannya⁴.

Dukungan PKI terhadap politik Soekarno yang radikal membuatnya semakin dekat dengan Presiden. Kampanye menentang penjajahan Belanda di Irian Barat serta

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ Wawancara dengan Oei Hiem Hwie pada tanggal 7 Oktober 2002 di jalan Medayu Selatan No. 6 (IV) Medokan Ayu Rungkut, Surabaya.

ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, disusul dengan politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia, telah dimanfaatkan betul oleh PKI. Pada waktu itu golongan komunis telah meningkatkan aksi-aksinya terhadap AS, seperti demonstrasi menentang *peace corps* dan film Amerika. Surat kabar-surat kabar PKI seperti *Djalan Rakyat* di Surabaya serta koran-koran pengikut lainnya dengan sendirinya ikut terjun dalam aksi-aksi politik tersebut.

Dengan keadaan situasi politik seperti itu tentunya Surabaya mengalami masa-masa yang mencekam, karena semakin banyaknya usaha-usaha yang dilakukan oleh PKI untuk menguasai sarana-sarana yang penting di masyarakat, seperti menguasai SOBSI Surabaya, menyusup ke dalam P^{WI} (Persatuan Wartawan Indonesia) cabang Jatim, SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dan organisasi masyarakat lainnya⁵. Hal tersebut banyak sekali timbul bentrokan-bentrokan antara massa PKI dengan massa pihak yang berseberangan dengannya. Banyak golongan massa dari Ansor dan basis lainnya yang menentang PKI berusaha menghalang-halangi jalannya PKI untuk melaksanakan program-programnya. Pada masa itu Surabaya dicekam *stagnasi* dalam pembangunan baik ekonomi maupun politik. Stagnasi tersebut tidak lepas dari situasi nasional. Banyak pemuda yang dulunya bersama-sama berperan dalam revolusi perjuangan menjadi saling bertrok karena berbeda aliran. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan, lebih-lebih pemuda yang frustrasi akibat penyelewengan sebagian aktivitas revolusi, mereka cenderung berbuat

⁵ *Ibid.*

keonaran, kegaduhan, berandalan dan sebagainya sehingga dalam waktu itu kota Surabaya menjadi kurang harmonis⁶. Pada hari Sabtu, 18 Mei 1960 di daerah Blauran, terjadi suatu usaha pengacauan oleh segerombolan pemuda *cross boys* (geng) yang nekad mengadakan pengacauan dengan merusak kaca sebuah toko Tionghoa dan mengganggu seorang pengendara scooter, akan tetapi kerusakan yang lebih hebat dapat dicegah berkat tindakan dari alat-alat keamanan negara, kemudian dapat ditahan oleh pihak berwajib beberapa *cross boys* untuk pengusutan lebih lanjut. Berhubung dengan adanya peristiwa tersebut maka pihak berwajib menyerukan agar rakyat bersikap tenang dan jangan sampai masuk perangkap provokasi atau bisikan-bisikan dari golongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak berusaha untuk mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Pihak keamanan negara senantiasa dalam keadaan siap siaga untuk mengatasi tiap kejadian yang tidak diinginkan dan berharap bantuan dari khalayak ramai bagi kelancaran tugas tersebut.

Pihak keamanan Propinsi Jatim menyerukan supaya toko-toko membuka pintunya agar perputaran roda ekonomi berjalan sebagaimana biasa, khususnya kepada orang-orang tua atau wali murid dimintakan perhatian terhadap pendidikan para puteranya agar mereka tidak terjerumus dalam *cross boyisme* yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dalam suasana kita bersama-sama sedang menanggulangi kesulitan ekonomi berlandaskan deklarasi ekonomi yang telah diamanatkan Presiden dan hendaknya kita senantiasa mencurahkan pikiran dan tenaga kita terhadap penyelesaian revolusi kita dalam hal mana golongan-golongan yang ekonomis

⁶ Hendrowinoto, *A. Azis Wartawan Kita* (Jakarta: Gramedia, 1985) hlm. 132.

kuat berkewajiban senantiasa menunjukkan kesetiakawanan terhadap amanat penderitaan rakyat kita. Sekali lagi peliharalah keamanan dan ketertiban negara kita⁷”.

Pada tahun itu juga di Surabaya juga terjadi demonstrasi oleh masyarakat menuju ke kantor Konsulat Inggris di jalan Djembatan Merah dalam rangka mengganyang Malaysia yang dicanangkan oleh Soekarno dalam Dwikora. Demonstrasi yang diikuti oleh 10.000 orang pemuda, pelajar, mahasiswa, kaum wanita, kaum buruh dan partai-partai politik baik tingkat I maupun tingkat II ini dipimpin oleh Front Nasionalis Daerah Djawa Timur dan Front Nasionalis Kotapradja Surabaya. Aksi tersebut berhasil menurunkan bendera Inggris dan merobek-robek bendera tersebut kemudian menaikkan bendera merah putih ke angkasa. Pihak keamanan tidak bisa berbuat apa-apa karena massa terlalu banyak⁸.

Dalam rangka mengatasi kondisi masyarakat Surabaya tersebut, maka keluarlah seruan Gubernur Djawa Timur, R. Suwondo:

“... Bahwasanya di dalam suasana kesulitan ekonomi dewasa ini yang hendak kita kuasai dengan sekuat tenaga dengan melaksanakan jiwa dan tujuan revolusi nasional, timbul gejala-gejala tidak puas itu dapat dimengerti, akan tetapi bilamana ketidakpuasan itu menjurus kearah perbuatan yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka perbuatan-perbuatan yang sedemikian itu tentu tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya golongan-golongan masyarakat yang sudah berada dalam keadaan ekonomis kuat dan mewah janganlah mendemonstrasikan kemewahan hidup secara mencolok sehingga dapat menyinggung perasaan golongan yang masih diliputi oleh serba kekurangan. Di dalam suasana yang demikian ini diminta pengertian bagi golongan tersebut untuk senantiasa menunjukkan rasa kesetiakawanan kepada amanat penderitaan rakyat kita dengan secara aktif ikut serta melaksanakan dan mensukseskan jiwa dan tujuan revolusi nasional.

⁷ *Trompet Masyarakat*, Senin 20 Mei 1963.

⁸ *Ibid.*, Jum'at 13 September 1963.

Akhirnya kami serukan kepada segenap lapisan penduduk rakyat Djawa Timur sebagai berikut:

(1). Peliharalah hidup rukun antara segenap golongan dan lapisan rakyat dengan senantiasa menghindarkan diri dari ucapan sikap maupun perbuatan yang dapat menyinggung perasaan golongan lain.

(2). Peliharalah kewaspadaan terhadap provokasi-provokasi dan bisikan-bisikan golongan orang yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan alat kaum kontra revolusi.

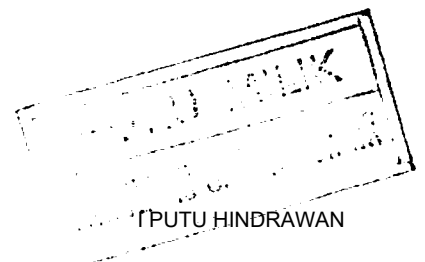
(3). Peliharalah keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai syarat mutlak bagi usaha untuk menanggulangi kesulitan kita dewasa ini.

(4). Bersikaplah tenang dalam menghadapi setiap kejadian dalam masyarakat, memegang teguh disiplin nasional serta memberikan bantuan serta kepercayaan kepada alat-alat keamanan negara kita dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban.

(5). Peganglah teguh amanat Presiden pada tanggal 1 Mei 1963 dimana antara lain beliau berkata, bahwa kembali ke keadaan tertib sipil tidak berarti kembali ke keadaan sebelum berlakunya keadaan bahaya di tahun 1957 dahulu dan seterusnya dikatakan bahwa meskipun keadaan bahaya tidak ada lagi, tidaklah itu berarti orang dapat bebas menggunakan hak-haknya tanpa bimbingan dan pimpinan dengan maksud untuk menyeleweng dari tujuan revolusi. Camkanlah itu semua, terima kasih⁹.

Menjelang dilaksanakannya aksi Gerakan 30 September 1965 di Kantor Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur Surabaya, *Gabungan Organisasi wanita Surabaya* (GOWS) mendesak agar *Pemerintah Daerah* (Pemda) Jawa Timur menerima delegasi yang akan datang untuk menyampaikan resolusi menurut penurunan harga. Setelah beberapa saat para pejabat Pemda Jawa Timur menunggu delegasi GOWS, ternyata yang datang bukan utusan GOWS, melainkan massa anggota PKI yang terdiri atas ormas-ormas *Pemuda Rakyat* (PR), *Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia* (CGMI), dan *Gerakan wanita Indonesia* (Gerwani). Mereka memenuhi halaman kantor Gubernur dan meyerbu ke dalam kantor melalui

⁹ *Ibid.*, 20 Mei 1963.



pintu dan jendela, kemudian memecahkan kaca-kaca jendela, pot-pot bunga, serta menghancurkan perabotan kantor secara tidak terkendali¹⁰. Selanjutnya gerombolan massa dengan sikap beringas mencari Gubernur, yang oleh pembantunya telah diamankan dari amukan massa PKI. Menurut wartawan *Manifesto*, Pekdiono hal tersebut dimungkinkan terjadi karena masyarakat pada waktu itu masih tergantung pada pemimpin dan tingkat pendidikan rendah sehingga mudah terprovokasi¹¹.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kemudian dapat diketahui bahwa tujuan demonstrasi massa PKI tersebut adalah untuk menangkap gubernur yang dijabat oleh seorang Perwira Tinggi AD, Brigjen TNI Wiyono kemudian akan mengaraknya diiringi berbagai hinaan selanjutnya dibunuh¹². Aksi teror ini merupakan uji coba kekuatan PKI terhadap kewibawaan Pemda Tingkat I Jawa Timur.

Selain melancarkan aksi-aksi di kota-kota, pihak PKI juga meluaskan *ofensif revolusioner* mereka di desa-desa, yang dikenal sebagai aksi sepihak. Dengan dalih memerangi tujuh setan desa, anggota-anggota Barisan Tani Indonesia (BTI/PKI) mengadakan aksi-aksi sepihaknya. Aksi-aksi PKI tersebut mendapat perlawanan dari rakyat dan ABRI sehingga dalam bentrokan yang timbul di beberapa tempat telah jatuh korban jiwa.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Pemumpasannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 53.

¹¹ Wawancara dengan Pekdiono pada tanggal 30 September 2002 di gedung PWI cabang Jawa Timur jalan Taman Apsari Surabaya. Pekdiono adalah wartawan surat kabar *Manifesto* Surabaya yang masih aktif pada tahun 1960-1965. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua koperasi PWI Jatim dan menjadi salah satu anggota wartawan Senior Jatim.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 54.

Ofensif PKI juga mendapat perlawanan dari kalangan cendekiawan dan pers anti PKI perlawanan terhadap terhadap PKI tersebut berkisar pada lahirnya Manifesto Kebudayaan, aksi boikot film-film AS dan masalah penyederhanaan partai. Manifesto Kebudayaan dilarang oleh Presiden Soekarno pada 8 Mei 1964 setelah organisasi kebudayaan PKI Lekra dan organisasi sejenis PNI, Lembaga Kebudayaan Nasional menyerangnya secara gigih¹³.

Perlawanan berikutnya menyusul aksi-aksi *Panitia Aksi Boikot Film Amerika Serikat* (PABFIAS), badan yang dibentuk oleh Front Nasional tetapi praktis telah ditunggangi PKI. Aksi-aksi PABFIAS meningkatkan pertentangan antara kelompok koran-koran PKI dan Pers anti PKI. Kasus PABFIAS tersebut menimbulkan polemik tajam antara koran golongan kanan nasionalis seperti: koran *Duta Masyarakat*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Suara Rakyat*, *Obor Revolui*, *Harian Umum* dan lain-lain di satu pihak melawan koran PKI seperti: surat kabar *Harian Rakyat*, *Bintang Timur*, *Suluh Indonesia*, *Warta Bhakti* (surat kabar Jakarta), *Djawa Timoer*, *Trompet Masyarakat*, *Djalan Rakyat*, *Mingguan Indonesia*, *Mingguan Pemuda* dan sebagainya di lain pihak.

Pada waktu ini golongan PKI telah berhasil menunggangi PWI, SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dan Kantor Berita Antara. Tatkala pemerintah menutup koran anti PKI (harian *Revolusi*), PKI memperbesar kekuatannya dengan menerbitkan koran-koran baru. Situasi yang semakin mencemaskan ini mendorong wartawan-

¹³ Pengurus Pusat PWI, *op.cit.*, hlm. 46.

wartawan senior seperti Adam Malik, B.M. Diah, Sumantoro dengan dibantu oleh wartawan-wartawan muda Jakarta seperti Asnawi Idris, Harmoko, Zulharmans, Yunus Lubis dan banyak lagi untuk mendirikan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) di lingkungan pers sebagai wadah perlawanan terhadap ofensif PKI di bidang Media Massa yang mendapat dukungan luas dari kalangan pers Indonesia, seperti di Surabaya, yang menjadi anggota BPS hanya wartawannya, Basuki Rahmat (*Jayabaya*), Faried Dimiyati (*Harian Umum*)¹⁴.

Pada pertengahan tahun 1965, dengan dukungan pemimpin Republik Rakyat Cina, PKI meningkatkan kampanyenya untuk menuntut nasakomisasi ABRI dan untuk menciptakan Angkatan ke-5. Sementara itu pada bulan Agustus terjadi perpecahan besar dalam tubuh PNI antara grup Ali Surachman dan grup Hardi Hadisubeno. Pada tanggal 27 September 1965, Panglima AD Jenderal Ahmad Yani mengeluarkan pernyataan menolak nasakomisasi ABRI dan menentang pembentukan Angkatan ke-5. Beberapa hari setelah itu, terjadilah pemberontakan melalui apa yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S).

Setelah aksi tersebut, Gubernur Djatim, Brigjen. Moh. Wijono menyerukan kepada seluruh warganya yang berbunyi sebagai berikut:

Seruan Gubernur Djatim

Ditujukan kepada:

1. Sad tunggal
2. Pegawai Negeri
3. Pemimpin-pemimpin Perusahaan Negara dan Daerah
4. Seluruh Hansip

¹⁴ SPS Jatim, *Pers Jatim Dari Masa Ke Masa* (Surabaya: SPS Jatim, 1994) hlm. 100.

5. Pemimpin-pimimpin Orpol dan Ormas

6. Seluruh rakyat Jawa timur

Dewasa ini kita tengah mengadakan konfrontasi yang sehebat-hebatnya terhadap musuh kita jang paling utama, yaitu NEKOLIM.

Hendaknya kita semua bersama mempertinggi kewaspadaan Nasional semaksimal-maksimalnya. Kita hanja tunduk, taat dan patuh kepada PJM Presiden SOEKARNO, Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI jang kita Tjintai bersama, dengan melalui hierarchienja jang sjah.

Djagalah persatuan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM dengan segala kedjudjuran, keichlasan serta kesadaran bernegara jang setinggi-tingginya.

Saudara-saudara jang mendengar berita RRI tgl. 1-10-1965 djam 07.00 dan djam-djam selanjutnya mungkin terkedjut dan bingung untuk menafsirkannja.

Sampai saat ini berita jang kami terima langsung dari Panglima Kodam VIII/Brawidjadja sendiri jang dewasa ini ada di Djakarta, ialah: bahwa Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno ada di tangan kita, tenaga-tenaga jang revolusioner jang setia dan taat kepada sumpah proklamasi 17-8-1945, beliau dalam keadaan aman dan sehat walafiat.

Hendaknya saudara-saudara jangan mengikuti berita-berita tidak resmi jang simpang siur. Ikutilah siaran-siaran RRI jang terus-menerus menjiarkan berita-berita resmi.

Pertinggi kewaspadaan, persatuan dan kesetiaan terhadap negara berdasarkan Pantjasila dibawah pimpinan BUNG KARNO.

Surabaja :1-10-1965

Djam : 22.00

A/n Pantja Tunggal

Gubernur KEPALA DAERAH DJAWA TIMUR

t.t.d

(Brig. Djen. Moh. Wijono)¹⁵

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapatlah dilihat bahwa kota Surabaya setelah terjadinya gerakan 30 September 1965 mengalami kebingungan mengenai berita yang benar atau yang salah. Masyarakat tidak dapat mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, sampai keluarlah seruan Gubernur Jatim Moh. Wijono.

¹⁵ Trompet masyarakat, *op.cit.*, 2 Oktober 1965.

Dalam rangka usaha melaksanakan Demokrasi Terpimpin, terbukti kemudian, bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang hendak ditegakkan tidaklah sesuai dengan pernyataan pemerintah, malah jauh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa UUD 45. Konsentrasi kekuasaan negara dalam satu tangan mulai dijalankan, sehingga demokrasi kekeluargaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan hanya merupakan semboyan kosong belaka. Nasakomisasi dalam segala bidang kehidupan negara yang dapat dukungan penuh dari kaum komunis hendak dipaksakan dan mereka yang menentang usaha ini disingkirkan. Kultus individu terhadap presiden Soekarno dipropagandakan secara meluas, sehingga dapatlah dikatakan, bahwa “Demokrasi Terpimpin” yang dicanangkan itu tidak lebih daripada usaha-usaha menuju kepada diktator yang otokratis²⁹

Mengenai kondisi pers di Surabaya adalah sama dengan kondisi pers di Indonesia khususnya mengenai peraturan-peraturan dari Pemerintah. Pers di Surabaya hidup dalam situasi politik yang tidak stabil karena beralihnya sistem Demokrasi Liberal ke Sistem Demokrasi Terpimpin. Kehidupan pers pada waktu itu diatur dengan peraturan-peraturan yang tujuannya agar mendukung pemerintah dalam menjalankan kegiatannya untuk menegakkan Demokrasi Terpimpin dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi atau bahkan tidak boleh terbit lagi.

²⁹ I. Taufik, *Perkembangan Pers di Indonesia* (Triyincó: Jakarta, 1977) hlm. 72.

Pers di Surabaya pada waktu itu tidak bebas dalam menyiarkan berita khususnya bagi berita yang bisa dianggap membahayakan program pemerintah, oleh karena itu sebelum mendapat surat izin terbit dari pemerintah, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh surat kabar tersebut yaitu diantaranya: mendukung dan membela manipol dan program pemerintah, menjadi alat penyebarluasan Manipol dengan tujuan menghapus Imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme dan separatisme dan lain sebagainya yang diatur dalam Peraturan Peperti No. 10/1960¹⁷.

Disamping itu pers di Surabaya juga diwajibkan untuk menandatangani pernyataan berisi 19 pasal formulir permohonan ijin penerbitan surat kabar dan majalah.¹⁸

Usaha PKI untuk menguasai pemerintahan pusat dilakukan dengan berbagai cara tidak luput juga pers juga digunakan untuk mencapai tujuannya. Melihat itu semua kalangan pers yang tidak menyukai aksi PKI tersebut melawannya dengan menulis berita-berita yang isinya menyudutkan pihak PKI, terlebih lagi dengan adanya golongan pers yang mendukung PKI juga menyerang pihak-pihak yang dirasakan menghalangi PKI untuk mencapai tujuannya.

Suasana yang demikian itu dirasakan adanya beberapa golongan yang berseberangan aliran di dalam pers itu sendiri yang kemudian menjurus kepada

¹⁷ Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: Gunung Agung, 1988) hlm. 12.

¹⁸ Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI, 1980) hlm. 314.

konflik yang dapat meresahkan masyarakat yang diakibatkan berita-berita yang kontroversial dan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya.

BAB III

PRES SURABAYA DALAM KONFLIK POLITIK 1960 - 1965